Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Bil Wakalah pada Produk Pembiayaan “Tepat Pembiayaan Syari’ah-Kelompok” di BTPN Syariah MMS Soreang

Robbyatul Adawiyah Shouma, Zaini Abdul Malik*, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*robiatuladawiah2011@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, anahimaya24@gmail.com

Abstract. This study examines the implementation of the DSN-MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 concerning the murabahah bil wakalah contract on the financing product "Tepat Financing Sharia-Group" at Bank BTPN Syariah MMS Soreang. This study aims to analyze how the implementation of the fatwa is applied in the practice of sharia financing at Bank BTPN Syariah MMS Soreang, as well as to evaluate compliance with sharia principles in the implementation of the product. This study uses a normative juridical approach method and is corroborated by data collection through interviews, observations, and literature studies. The results of this study show that the implementation of the murabahah bil wakalah contract in the Tepat Financing Sharia-Group financing product becomes a unity with the Financing Application and Account Opening Application form (AP3R) and what is the onjek of the contract is only in the form of money and not goods without any further supervision after the contract on the customer's business. Which in the contract process carried out is not fully in accordance with the provisions of murabahah in Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah, especially in point-9. Where the bank conducts a contract without ownership of the goods and there is no further supervision if the bank delegates the purchase of goods to the customer to buy the goods themselves to a third party. A murabahah contract is said to be valid if it has fulfilled the pillars and conditions, and if it does not meet one of them, then the contract can be at risk

Keywords: *Murabahah Bil Wakalah, Productive Pre-Prosperous Communities, Appropriate Financing Sharia-Group Financing.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji implementasi dari Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan “Tepat Pembiayaan Syari’ah-Kelompok” di Bank BTPN Syariah MMS Soreang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi fatwa tersebut diterapkan dalam praktik pembiayaan syari’ah di Bank BTPN Syariah MMS Soreang, serta untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari’ah dalam pelaksanaan produk tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dikuatkan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan Tepat Pembiayaan Syari’ah-Kelompok ini menjadi kesatuan dengan formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan Pembukaan Rekening (AP3R) dan yang menjadi onjek akad hanyalah berupa uang dan bukan barang dengan tanpa adanya pengawasan lanjutan setelah akad pada usaha nasabah. Yang dimana pada proses akad yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan murabahah pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah terkhusus pada poin-9. Dimana bank melakukan akad tanpa adanya kepemilikan barang dan tidak ada pengawasan lanjutan jika bank mewakili pembelian barang kepada nasabah untuk membeli barang sendiri pada pihak ketiga. Akad murabahah dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, dan apabila tidak memenuhi salah satunya, maka akad tersebut dapat beresiko rusak atau batal.

Kata Kunci: *Murabahah Bil Wakalah, Masyarakat Pra-Sejahtera Produktif, Pembiayaan Tepat Pembiayaan Syari’ah-Kelompok.*

A. Pendahuluan

Perbankan pada kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal tersebut disebabkan karena fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok merupakan salah satu dari banyaknya produk pembiayaan di Bank BTPN Syariah. Dimana produk tersebut secara khusus diperuntukan untuk perempuan prasejahtera produktif dengan sistem berkelompok, dan dilakukan berdasarkan kepada akadperjanjian jual beli sebagai dasar hukumnya.

Bank BTPN Syariah sebagai satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang berfokus untuk memberikan pelayanan bagi pemberdayaan nasabah masyarakat inklusif dan mengembangkan keuangan inklusif, salah satunya pada produk pembiayaan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Keuangan inklusif artinya adalah strategi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas untuk masyarakat secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat[1].

Produk Tepat Pembiayaan Syari'ah-Kelompok Bank BTPN Syari'ah MMS Soreang ini dilakukan dengan berdasar kepada akad *murabahah bil wakalah*. Produk ini sebelumnya disebut dengan Paket Masa Depan (PMD) yang memiliki fokus pada pembangunan karakter serta kebiasaan-kebiasaan baik nasabah, yaitu Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling Bantu (BDKS). Sesuai dengan slogan yang digunakan oleh Bank BTPN Syari'ah pada seluruh produk pembiayaannya yaitu "berangkat dari niat baik untuk tumbuh dan memiliki hidup yang lebih berarti". Maka dari itu bank BTPN Syariah berusaha untuk memanfaatkan potensi tersebut dengan menyediakan wadah bagi produk pembiayaan yang diperuntukan bagi kaum perempuan khususnya yang ada di daerah pelosok pedesaan[2].

Mobile Marketing Sharia (MMS) dan wisma merupakan unit kerja yang ada pada produk pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok, dimana MMS bertugas untuk mendukung kantor cabang dalam melakukan penyaluran pembiayaan dari produk Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok. Sedangkan wisma merupakan tempat tinggal bagi karyawan MMS sekaligus untuk melakukan koordinasi dengan kantor pusat atau kantor induknya. Maksudnya adalah MMS dan wisma berada pada satu wilayah atau lokasi yang sama. MMS BTPN Syariah sendiri tersebar di 1.800 titik yang ada di seluruh Indonesia.

Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok memiliki 4 pilar, yang dimana semua pilar tersebut saling berkesinambungan dengan harapan dapat membentuk karakter kunci nasabah (BDKS). Keberanian nasabah untuk memulai usaha menjadi langkah awal untuk berani berusaha, lalu komitmen dan kemampuan nasabah dalam mewujudkan semua niat baik mereka agar lebih cepat adalah inspirasi bagi bank, selain itu dengan kedisiplinan nasabah untuk datang ke Pertemuan Rutin Sentra (PRS) dan juga membayar angsuran dengan tepat waktu, dan yang terakhir adalah solidaritas yang dimiliki oleh sesama anggota yang mewujudkan sikap dan nilai saling bantu antar sesama manusia.

berdasarkan konsep tersebut model yang diterapkan oleh BTPN Syariah dalam produk pembiayaan tersebut adalah dengan sistem tanggung renteng. Sebagai tanggung jawab bersama seluruh anggota satu kelompok atas segala kewajiban yang berdasarkan saling keterbukaan dan saling percaya.

Murabahah, menurut Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, adalah akad jual beli barang yang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba *Murabahah* menurut penjelasan Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan : "c. akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati"[3].

Menurut Hasbi Ash Siddiqie, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan kepada orang lain sebagai gantinya untuk bertindak, *wakalah* menurut ulama hanafiah adalah perbuatan hukum seseorang dalam rangka menempatkan pihak lain pada posisi dirinya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh dan diketahui.

Akad murabahah bil wakalah merupakan akad jual beli yang dimana Lembaga Keuangan Syariah mewakili pembelian produknya tersebut kepada nasabah, lalu setelahnya produk tersebut akan di dapatkan oleh nasabah, kemudian nasabah memberikannya kepada pihak bank atau Lembaga Keuangan Syariah. Setelah produk atau barang tersebut dimiliki oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah dan harga dari produk tersebut jelas, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat menentukan margin atau keuntungan yang didapatkan serta jangka waktu untuk pengembalian yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 ayat 9 : “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Maka dari itu sesuai dengan pernyataan Fatwa tersebut akad murabahah bil wakalah dapat dilaksanakan dengan syarat apabila barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya harus sudah menjadi milik bank, kemudian setelah barang tersebut sudah dimiliki oleh bank maka akad murabahah dapat dilakukan.

Selain itu pada praktiknya jika produk pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok Bank BTPN Syariah menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, maka pihak bank tidak dengan secara langsung membelikan barang yang dibutuhkan atau dipesan oleh nasabah, tetapi bank mewakikkan pembeliannya kepada pihak nasabah itu sendiri untuk mengalokasikan dana pembiayaan tersebut kepada barang yang dibutuhkan, dengan catatan pembelian harus atas nama bank dengan menggunakan surat *wakalah*, akan tetapi pada praktiknya di Bank BTPN Syariah ini yang menjadi objek dari akad *murabahah* itu sendiri bukanlah suatu barang, melainkan hanya berupa uang tanpa adanya kejelasan atau ketegasan yang sesuai dengan konsep akad *murabahah bil wakalah*.

Karena adanya indikasi permasalahan tersebut maka memungkinkan jika terjadinya kecurangan atau ketidak jujuran nasabah atau pihak penerima dana pembiayaan ini untuk mengalokasikan dana pembiayaan tersebut kepada kebutuhan konsumtif bukan digunakan untuk kebutuhan produktif dan itu semua seringkali berdampak kepada sistem pembayaran angsuran yang digunakan yaitu, tanggung renteng atau uang solidaritas. Di dalam dunia perbankan tanggung renteng sendiri maksudnya adalah tanggung jawab yang akan ditanggung bersama-sama atas dasar hutang peminjam, pada praktiknya di Bank BTPN Syariah ini yang dimaksud tanggung renteng adalah anggota satu kelompok yang akan menanggung angsuran jika ada pembiayaan bermasalah milik anggota kelompok yang lain.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian berupa yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan empiris atau *field research* dan sumber data utama yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu data sekunder dan data primer. Dimana data primer yang diperoleh adalah dengan cara terjun langsung di lokasi tempat terjadinya suatu peristiwa atau di lapangan dan juga Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari penelitian literatur atau sumber-sumber lain seperti buku-buku fikih *muamalah maliyah*, artikel, jurnal yang relevan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dala penelitian ini adalah dengan cara wawancara, yang meliputi Nasabah aktif bank BTPN Syariah MMS Soreang dan juga karyawan Bank BTPN Syariah MMS Soreang, selain wawancara metode pengumpulan data lainnya adalah observasi dan studi kepustakaa. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan deskriptif analitis. Dimana analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menata dengan sistematis hasil dari observasi, wawancara maupun hasil lainnya secara faktual dan akurat[4]. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai fakta-fakta, serta korelasi atau hubungannya antara fenomena yang diselidiki dengan fakta yang ada yaitu Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah bil wakalah* pada salah satu produk pembiayaan di Bank BTPN Syariah MMS Soreang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Akad *Murabahah Bil Wakalah* pada Produk Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok di Bank BTPN Syaria'h MMS Soreang

Berdasarkan hasil daripada penelitian yang dilakukan oleh penulis pada wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu nasabah dan *Senior Business Manager* (SBM) MMS Soreang, pada tanggal 11 Mei 2024, adapun yang digunakan untuk menjadi landasan hukum di bank BTPN Syariah pada produk pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok adalah Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah* dimana beliau menyatakan bahwa untuk mengajukan pembiayaan pada produk Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok di Bank BTPN Syariah MMS Soreang dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* ini ada beberapa syarat dokumen yang harus dipenuhi seperti KTP, KK dan Formulir AP3R. Setelah semua dokumen dan syarat dipenuhi oleh calon nasabah, maka selanjutnya akan dilakukan tahapan-tahapan akad pembiayaan berdasarkan dengan prosedur pemberian pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok, yaitu :

1. Tahap yang pertama adalah *Pre Marketing*. Pada tahap ini tim MMS akan melakukan pertemuan dengan aparat desa setempat yang bertujuan untuk bersilaturahmi dan mensosialisasikan produk Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok, selain itu juga tim MMS akan mencari informasi kepada aparat setempat mengenai calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan.
2. Tahap yang kedua adalah survei dan wawancara. Pada tahap ini tim MMS akan memastikan dan memeriksa bahwa nasabah yang akan diberikan pembiayaan layak, memiliki karakter yang baik dalam melakukan aktivitas usahanya maupun utang piutang.
3. Tahap yang ketiga adalah pelatihan dan pembentukan kelompok dan juga penentuan lokasi sentra. Dimana pada tahap ini pastinya nasabah yang sudah lolos seleksi atau sudah memenuhi kualifikasi dan akan diberikan pelatihan dasar oleh pihak bank secara rinci mengenai produk Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok secara sederhana, kemudian setelah itu pihak bank akan membentuk kelompok sentra dan menentukan lokasi sentra berdasarkan dari hasil kesepakatan bersama antar nasabah
4. Tahap yang keempat adalah proses pemberian pembiayaan, dimana pada tahap ini terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah baru atau yang belum pernah mengajukan pembiayaan. Dimana untuk nasabah baru nanti mereka diharuskan untuk mengisi formulir Aplikasi Permohonan dan Pembukaan Rekening (AP3R) dengan lengkap mencantumkan jumlah plafond yang diinginkan, jenis usaha yang diajukan untuk mendapat rekomendasi dari ketua grup atau sentra. Lalu yang kedua adalah pemberian pembiayaan kepada nasabah siklus lanjutan yang akan diberikan kepada nasabah tetap yang sudah pernah mendapat pembiayaan. Dimana pada nasabah siklus lanjutan ini mereka berhak untuk mengajukan kenaikan plafond pembiayaan dan melanjutkan pembiayaan ketika pembayaran angsuran pembiayaan selesai. Selain itu untuk nasabah siklus lanjutan juga tetap akan dilakukan evaluasi dan dilihat berdasarkan absensi rutin sentra dan penggunaan uang solidaritas.
5. Tahap yang kelima adalah persetujuan pembiayaan dan batas waktu wewenang memutus pembiayaan (BWMP). Persetujuan tersebut dilakukan dengan cara menerapkan prinsip *dual control* pada setiap pembiayaan dan juga pejabat pemutus yang merupakan pejabat di kantor pusat yang dimana berwenang untuk memberikan persetujuan atas pembiayaan yang sesuai dengan apa yang telah diajukan oleh nasabah dengan limit yang sudah ditetapkan oleh bank. Setelah mendapatkan persetujuan pembiayaan dan batas wewenang memutus pembiayaan (BWMP) dari pihak kantor pusat, maka nasabah akan diberitahu untuk melakukan akad pembiayaan dalam waktu 2 minggu. Akad pencairan dana pembiayaan akan dilakukan oleh tim MMS atau *Community Officer* setelah adanya surat kuasa dari kantor pusat. Selain itu akad merupakan suatu kesatuan dengan formulir Aplikasi Permohonan dan Pembukaan Rekening (AP3R) dan apabila nasabah buta huruf maka tim MMS wajib untuk memastikan bahwa nasabah mengerti akan informasi dan isi dari surat akad (kontrak) yang akan ditandatangani, pada akad nasabah diharuskan mengisi nama nasabah sendiri dan proses penandatanganan wajib disaksikan oleh ketua sentra atau ketua kelompok.

6. Tahap yang terakhir yaitu akad pembiayaan dan pemberian surat kuasa. Yang dimana pada tahap ini adalah menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Hal itu dikarenakan objek pembiayaan yang akan diakad-kan hanya berupa uang, dimana uang tersebut harus dibelanjakan kepada barang yang sesuai dengan perjanjian yang sudah dimohonkan oleh nasabah dalam formulir AP3R, apabila akad pembiayaan tersebut telah selesai dilaksanakan juga nasabah telah menerima pembiayaan produk Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok maka bank akan melakukan *maintennace* kepada nasabah ketika pertemuan rutin sentra (PRS) yang akan dilakukan selama 2 minggu sekali dalam satu bulan pada hari dan jam yang telah ditentukan atas kesepakatan bersama antara semua anggota kelompok sentra. Selain itu juga pembina sentra harus memastikan keaktifan anggota sentra ketika Pertemuan Rutin Sentra (PRS) dan memonitoring terkait usaha nasabah dan kelancaran dari pembayaran pembiayaan milik nasabah.

Berdasarkan kepada hasil wawancara yang penulis lakukan, dimana pada praktiknya yang menjadi objek akad dalam pembiayaan ini hanya berupa uang dan bukan barang. Selain itu berdasarkan dari hasil penelitian penulis diatas, maka tidak jarang juga ditemukannya nasabah yang menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kepentingan lain yang diluar kontrak, seperti dari hasil.

Selain itu, berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan adalah dari akad yang dilaksanakan di atas, akad atau kontrak yang dilakukan oleh Bank BTPN Syariah pada produk pembiayaan tepat pembiayaan syariah-kelompok adalah akad yang “sah” secara hukum dan juga tergolong kepada bentuk akad pembiayaan yang pasti. Baik itu dari segi jumlah yang harus dibayarkan oleh nasabah maupun jangka waktu pembayaran yang dilaksanakan. Selain itu margin yang diperoleh juga pasti, karena sejak dari awal transaksi akad yang dilakukan antara bank dengan nasabah sudah disepakati. Akan tetapi pada saat pertemuan rutin sentra (PRS), penulis tidak menemukan adanya monitoring usaha lebih lanjut dari pihak bank, baik dari segi pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah maupun tindak lanjut oleh bank mengenai bukti pembayaran atau kwitansi barang yang diajukan oleh nasabah yang sesuai dalam formulir Aplikasi Permohonan dan Pembukaan Rekening (AP3R) yang dimana hal tersebut dapat memungkinkan adanya resiko nasabah tidak membelikan dana pembiayaan kepada barang yang dijanjikan sesuai dengan formulir Aplikasi Permohonan dan Pembukaan Rekening (AP3R). dan hal tersebut beberapa kali penulis temukan pada beberapa nasabah kelompok sentra di MMS Soreang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dengan produk Tepat Pembiayaan Syari’ah-Kelompok di Bank BTPN Syariah MMS Soreang

Berdasarkan pada hasil temuan penelitian penulis mellaui wawancara dengan nasabah dan ibu FO selaku *Senior Business Manager* (SBM) Bank BTPN Syariah MMS Soreang, pada tanggal 11 Mei 2024, adapaun yang digunakan untuk menjadi landasan hukum di bank BTPN Syariah pada produk pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok adalah Fatwa DSN-MUI No04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* sebagai akad pelengkap.

Fakta yang penulis temukan dilapangan dan dalam penggunaan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang akad *murabahah bil wakalah* di Bank BTPN Syariah MMS Soreang pada produk pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok ini tidak konsisten dan tidak menyeluruh dalam menggunakan Fatwa DSN yang diterapkan tersebut dalam produk Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok. Terutama terkiat dengan status kepemilikan barang atau objek yang diakadkan. Karena pada praktiknya yang mnejadi objek pembiayaan dalam produk Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok di Bank BTPN Syariah MMS Soreang ini hanya berupa uang. Padahal sudah jelas ditegaskan pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah bil wakalah* dalam ketentuan umum poin ke-9 yaitu “ jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”[5].

Selain itu setelah akad berlangsung juga tidak ada kejelasan atau pengawasan yang lebih lanjut terkait dengan pengembalian nota pembelian ataupun bukti pembelian lainnya. Maka dari itu nasabah tidak jarang melakukan wanprestasi dengan tidak membelikan dana pembiayaan

yang diberikan kepada barang yang sesuai dengan perjanjian, dan berdampak kepada anggota kelompok lain jika nantinya nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut terkendala dalam pembayaran angsuran.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan tersebut, penulis menemukan adanya beberapa permasalahan atas kerancuan mengenai status kepemilikan barang yang akan diakad-kan pada produk pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok ini. Dimana menurut penulis hal tersebut jelas bertentangan dengan salah satu ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah bil wakalah*, yang dimana seharusnya pada saat akad pembiayaan berlangsung bank harus terlebih dahulu mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dengan melakukan akad *wakalah* baru kemudian setelah itu melaksanakan akad pembiayaan *murabahah* dimana setelah secara prinsip barang menjadi atas nama atau milik bank. Beberapa indikator permasalahan tersebut juga dapat terlihat dari prosedur pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok, yaitu:

1. Tidak adanya objek barang yang ditawarkan pada saat akad berlangsung, sehingga yang menjadi objek hanyalah berupa uang.
2. Nasabah kurang memahami tentang akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok, dimana yang nasabah ketahui hanyalah pinjaman pembiayaan untuk modal usaha yang sistemnya berkelompok dan kapan mereka harus membayar.
3. Tidak adanya pengawasan lebih lanjut setelah akad, seperti misalnya pengumpulan nota pembelian ataupun bukti pembelian barang lainnya.
4. Nasabah atau anggota kelompok tidak jarang melakukan wanprestasi dengan tidak membeli barang yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam formulir AP3R. Sehingga dapat merusak akad dan berdampak kepada anggota kelompok lainnya ketika nantinya nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut tidak dapat melunasi angsuran pembiayaan.
5. Pelaksanaan akad pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, objek yang di akadkan juga dalam bentuk uang yang diberikan langsung kepada nasabah untuk membeli barang, sedangkan seharusnya akad pembiayaan dilakukan ketika barang sudah ada atau sudah dibeli dan menjadi milik bank. Kemudian selain itu, jika yang membeli barang adalah nasabah, maka seharusnya dibuktikan dengan adanya bukti pembelian barang pada saat akad dilakukan.
6. Dalam akad produk pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok di Bank BTPN Syariah tidak adanya komoditas barang yang dibeli, maka dari itu tidak ada bedanya keuntungan *murabahah* atau margin yang didapat dalam akad produk pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok dengan bunga bank pada bank konvensional.

Berdasarkan kepada indikator temuan masalah tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa analisis dari praktik akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok di Bank BTPN Syariah ini menjadi batal karena tidak konsisten terhadap dasar hukum yang digunakan yaitu, Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah* yang didefinisikan sebagai kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Karena pada praktiknya objek akad tersebut hanya berupa uang dan tidak adanya pengawasan yang lebih lanjut pasca akad terkait pengumpulan nota ataupun bukti pembelian barang lainnya.

Maka dari itu, jika Bank BTPN Syariah dalam produk pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok menggunakan akad *murabahah bil wakalah* kepada nasabah untuk membeli barang sendiri, maka Bank BTPN Syariah seharusnya selaku penyedia dana harus melakukan pengawasan dan meminta bukti pembelian barang kepada nasabah, hal tersebut agar terhindar dari kebohongan nasabah dalam penggunaan dana pembiayaan yang diberikan oleh bank, sehingga akad yang dilakukan akan tepat sasaran sebagaimana yang diajukan didalam formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan Pembukaan Rekening (AP3R) dan juga agar terhindar dari kerancuan hukum sehingga akad *murabahah bil wakalah* dapat sejalan dengan ketentuan syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan akad pada produk Pembiayaan Tempat Pembiayaan Syariah-Kelompok di Bank BTPN Syariah MMS Soreang dalam praktiknya ini menggunakan akad murabahah bil wakalah yang dimana Bank BTPN Syariah melakukan pemberian kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri (wakalah). Akan tetapi yang menjadi Objek hanyalah berupa uang dan tidak ada barang. Dimana bank menyetujui penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli tanpa adanya monitoring lanjutan seperti pengumpulan nota pembelian, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah dan akad yang digunakan menjadi batal.
2. Analisis praktik akad murabahah bil wakalah yang digunakan di Bank BTPN Syariah MMS Soreang pada produk pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Murabahah karena pada produk tersebut Bank BTPN Syariah MMS Soreang melakukan akad murabahah dan akad wakalah secara bersamaan pada satu waktu. Selain itu yang menjadi objek dari pembiayaan tersebut hanyalah berupa uang bukan barang, hal tersebut bertentangan dengan salah satu ketentuan akad murabahah bil wakalah yang ada pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah poin ke-9 “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Dimana seharusnya Bank BTPN Syariah MMS Soreang melakukan akad tersebut secara terpisah, yaitu dengan mendahulukan akad wakalah dimana bank mewakilkan kepada nasabah terkait dengan modal atau pembelian barang yang diinginkan, kemudian setelah itu nasabah menyerahkan bukti pembelian kepada pihak bank BTPN Syariah MMS Soreang dengan selanjutnya dilakukan akad murabahah, setelah nasabah membeli barang dan memberikan bukti pembelian barang tersebut kepada pihak bank. Maka dengan demikian barulah mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN- MUI/IV/2000 Tentang murabahah.

Acknowledge

Penyusunan penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa Rahmat dan juga Ridho-Nya, dan juga semua pihak yang turut memebantu dan mendoakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat, hidayah, Kesehatan, rezeki dan nikmat yang tidak terhingga, serta yang selalu meridhoi hal-hal baik.
2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Meno Sutarno yang sudah berbahagia di syurga-Nya dan Ibunda Ipit Nurjanah yang telah mendukung baik dalam segi materil maupun non materil. Terimakasih yang tak terhingga atas doa, kasih sayang, semangat dan pengorbanan yang diberikan selama ini sehingga penulis dpaat berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.
3. Kedua dosen pembimbing saya Bapak Dr. Zaini Abdul Malik, S.ag dan Ibu Neng Dewi Himayasari S.E., M.H atas keikhlasannya dalam membimbing saya dan keridhoannya untuk meluangkan waktu dan tenaga ditengah kesibukannya, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada saya dalam setiap proses penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] K. K. R. Badan Kebijakan Fiskal, “Keuangan Inklusif di Indonesia Akses Keuangan di Indonesia.” Diakses: 20 Mei 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-inklusif>
- [2] BTPN Syariah, “BTPN Syariah, Profil,” <https://btpnsyariah.com/in/profil>.

- [3] 1954- Wiroso, *Produk perbankan syariah : dilengkapi UU perbankan syariah & kodefikasi produk bank Indonesia*. LPFE Usakti, 2009.
- [4] Prof. DR. Sugiyomo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Edisi ke 12. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.
- [5] “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.” Diakses: 8 Maret 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae903f1b965d0955b313435363133.html>
- [6] Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra, dan Ira Siti Rohmah Maulida, “Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, hlm. 83–90, Des 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2789.
- [7] Asri Sundari, D. Solihin, Saepul Ma'mun, dan Venny Setyowardani, “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Desa Cimareme terhadap Minat Menabung di Bank Syariah,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, hlm. 75–82, Des 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.1659.
- [8] I. R. Pitsyahara and A. Yusup, “Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 57–62, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1750.